

---

## PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Oleh

Ramla Ilham Darise

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Madako Tolitoli

E-mail: [ramladarise77@gmail.com](mailto:ramladarise77@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 08-07-2024

Revised: 21-07-2024

Accepted: 07-08-2024

### Keywords:

Balancing Funds, and  
Regional Financial  
Independence

**Abstract:** *The Influence of Balancing Funds on Regional Financial Independence in Tolitoli Regency guided. This study aims to determine the effect of balancing funds on Regional Financial Independence in Tolitoli Regency. The variables studied are balancing funds (X) and regional financial independence (Y). The sampling technique in this study used a saturated sample technique. The research instrument used in this study was a ratio scale with a simple regression analysis technique where the data was analyzed using the SPSS for Windows 23 program. Simple linear results show that balancing funds have a positive and significant effect on regional financial independence in Tolitoli district.*

---

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Ayat (6), Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi sudah menjadi tren di dunia. Hampir setiap negara memiliki struktur subnasional pemerintahan dan tentu salah satu tujuannya adalah pemerataan pelayanan dan pembangunan yang lebih terarah. Begitu pun Indonesia yang memiliki berbagai pemerintahan daerah dalam bingkai kesatuan. Tugas-tugas pemerintah yang dahulu terpusat kini didistribusi kepada pemerintah daerah agar pelayanan lebih dekat ke masyarakat. Untuk itu, bersamaan dengannya pula desentralisasi fiskal dilakukan untuk membiayai segala kebutuhan daerah. Desentralisasi fiskal adalah penugasan kepada pemerintah daerah untuk mendanai fungsi-fungsi yang ditugaskan kepada mereka. Ini melibatkan penugasan baik sumber pendapatan daerah sendiri maupun transfer fiskal antar pemerintah

Dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah akan lebih leluasa dalam menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini seiring dengan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu

: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2003:59). Kebijakan prospek keuangan daerah merupakan satu upaya pemerintah daerah untuk menghimpun dana untuk pengelolaan pembangunan secara mandiri dan berkesinambungan. Komponen yang menjadi sangat penting dalam proses penyelenggaraan aktivitas pemerintah daerah adalah sebuah sistem keuangan yang diatur melalui Pasal 282 Undang-undang 23 Tahun 2014 yang pada esensinya adalah bahwa penyelenggaraan aktivitas pemerintah daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dilakukan atas beban APBD. Pengeluaran pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan ini digunakan untuk belanja, Operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Pengalokasian belanja pada masing-masing jenis belanja diprioritaskan pelayanan disarana pendidikan

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan tersebut dalam bentuk alokasi belanja modal yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Adiputa, dkk, 2015).

Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Serta mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan otonomi kepala daerah, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah.

Setiap transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah akan ditujukan untuk membiayai belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Pelaksanaan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Efektifitas DAU dan DAK diharapkan dapat meningkatkan kinerja kemandirian keuangan daerah.

Berikut ini adalah gambaran umum mengenai perkembangan dana perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2013-2020.

Tabel 1.1

Realisasi Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pengeluaran Daerah, dan

Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah	Pengeluaran Daerah (TKD)	Kemandirian Keuangan Daerah
2013	581.470.587.000	24.148.419.000	609.747.340.000	3,96%
2014	636.127.768.000	47.846.420.000	724.609.872.000	6,60%
2015	670.921.263.000	63.600.801.000	865.617.496.000	7,35%
2016	761.289.991.000	63.623.624.000	946.614.743.000	6,72%
2017	881.358.339.000	100.514.206.000	1.100.849.886.000	9,13%
2018	816.482.058.000	80.312.116.000	1.019.779.241.000	7,88%
2019	906.631.647.000	91.724.083.000	1.152.615.934.000	7,96%
2020	816.703.212.000	96.205.584.000	1.095.466.697.000	8,78%
2021	973.286.009.000	130.208.815.000	1.118.273.989.000	11,64%
2022	911.810.887.000	159.987.507.000	1.120.311.936.000	14,28%

Kabupaten Tolitoli Tahun 2013-2022

Sumber data : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013-2022

Berdasarkan tabel diatas terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan dana perimbangan tiap tahunnya. Pada tahun 2022 terjadi penurunan dana perimbangan sebesar 61.475.122.000 atau 6,32% dari tahun sebelumnya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga berfluktuasi setiap tahunnya, dimana kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tolitoli dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 masih rendah sekali berada pada kisaran 0-25 atau belum mencapai 25%, dimana daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka untuk mengetahui apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dapat dilakukan melalui penelitian dengan judul "Pengaruh dana perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli".

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tolitoli?

Bersasarkan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tolitoli

Manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai : Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu ekonomi dan pemerintahan daerah.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini memberikan gambaran atau informasi tentang Memberikan masukan

kepada pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli dalam upaya pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan dana perimbangan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan public.

## LANDASAN TEORI

### Dana Perimbangan

Ketimpangan Menurut Dandi Darmadi (2021:34), Dalam struktur APBD pada pemerintah daerah dana perimbangan masih mendominasi secara kuat, bahkan setiap pemerintah daerah menaruh harapan besar pada pos dana perimbangan ini. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Terdapat tiga jenis dana perimbangan antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### 1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil (DBH) merupakan hak setiap daerah karena dalam prinsipnya DBH dilaksanakan menurut sumbernya, yaitu bagian daerah atas penerimaan yang dibag hasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam (Dandi Darmadi, 2021:35).

#### 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan penegeluaannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum memiliki tujuan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan dan potensi daerah. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum diterapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam APBN. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan penegeluaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah (Wandiea,2013).

#### 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berbeda dengan dana alokasi umum, dan alokasi khusus (DAK) memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya memiliki keterbatasan dalam penggunaan karena DAK dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu saja yang menjadi program prioritas Nasional. Bersarkan alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks bersarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kroteria teknis,keroteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuanga daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang diterapkan setiap tahun.

### Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Dandi Darmadi (2021:85) kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

Tri Wahyuningsih (2020:274), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah :

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat Kemandirian Daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dengan rumus :

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pengeluaran Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Tri Wahyuningsih (2021:87)

Dandi Darmadi (2021:87), Pola hubungan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :

Tabel 1. Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber : Dandi Darmadi (2021:87)

Dandi Darmadi (2021:87) mengemukakan hubungan tentang pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah:emeri

- a. Pola hubungan instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
- b. Pola hubungan konstruktif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi. Hal ini dikarenakan daerah sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
- d. Pola hubungan delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi

daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

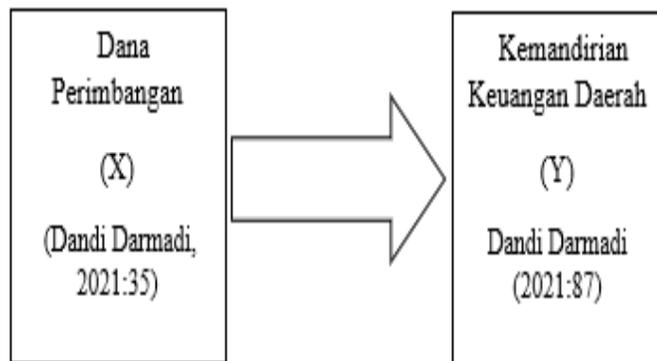
### Kerangka Pemikiran

Daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana perimbangan bertujuan membantu daerah dalam mendanai kewenangannya serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1

### Kerangka Pemikiran

#### Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka dan kerangka pemikiran maka permasalahan hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Ho: Tidak ada pengaruh Dana perimbangan terhadap Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tolitoli
- 2). Ha: Terdapat pengaruh Dana perimbangan terhadap Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tolitoli.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tolitoli yang beralamat di Jl. Moh. Bantilan No.1 Kel. Baru Tolitoli. Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan selesainya pengambilan data untuk menyusun skripsi.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui pengajuan hipotesis dan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap dependen. Melalui data yang diolah menjadi angka-angka dan analisisnya menggunakan statistic

### **Operasionalisasi Variabel**

Operasional Variabel penelitian adalah suatu atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk atau dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:68). Sesuai dengan judul penelitian ini adalah pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu, variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yaitu :

#### **a. Variabel Independen (Variabel Bebas)**

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel bebas adalah yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

#### **b. Variabel Dependen (Variabel terikat)**

Menurut Sugiyono (2019:69) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas

### **Jenis Dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:137) data sekunder adalah data penelitian yang di peroleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada pengumpul data, data berasal dari instansi Badan Keuangan Daerah dan Badan Pusat Statistik.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh bersumber dari Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli (BKD) dan Statisitik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Teknik pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan gambaran /kondisi maupun landasan teoritis yang berhubungan dengan judul penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mempelajari data-data keuangan daerah berupa pajak daerah serta membaca dan mempelajari literatur-literatur, *e-book*, artikel, jurnal, dan sumber-sumber data sekunder lainnya yang dapat membantu penulis dalam penelitiannya. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan permohonan permintaan data laporan keuangan pemerintah daerah pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli (BKD) dan mendownload data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah pada situs sulteng.bps.go.id.

### **Teknik Analisis Data**

Sebelum masuk pada regresi sederhana, peneliti terlebih dulu melakukan uji

normalitas. Uji normalitas dilakukan karena data yang digunakan pada penelitian ini hanya 10 tahun (2013-2022) tidak mencapai 30 data sebagai prasyarat minimal untuk menggunakan regresi

#### Uji Asumsi Klasik

Menurut Sugiyono (2013:54) uji asumsi klasik persyaratan statistis yang harus di penuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square (ols)*. Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji Normalitas, uji Multikolinearitas, uji Autokorelasi, dan uji Heteroskedastisitas

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populaasi yang sebarannya normal. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistisk parametric memiliki asumsi normalitas sebaran data.

##### 2) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107-108) uji autokorelasi bertujuam apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

##### 3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari residual satu kepengamatan yang lain.

##### 4) Regresi Linear Sederhana

Sugiyono (2018:148), mengatakan bahwa regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

##### 5) Uji t (Uji Parsial)

uji satistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh saru variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen.

##### 6) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, jika  $R^2 = 100\%$  berarti variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen, demikian sebaliknya jika  $R^2 = 0$  berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Kabupaten Tolitoli.

Kabupaten Tolitoli adalah Kabupaten yang awalnya terdiri dari dua wilayah (dua kewedanan) yaitu kewedanan Buol yang termasuk daerah tingkat II Kabupaten Gorontalo dan kewedanan Tolitoli yang termasuk daerah tingkat II Kabupaten Donggala. Sebelum penjajahan belanda kedua wilayah ini sudah termasuk daerah swapraja sehingga pemerintahannya bersifat kerajaan. Demikian pula pada abad XVII Agama Islam masuk dikedua wilayah ini sehingga penduduknya mayoritas beragama islam. Tahun 1946 pemerintah NICA menguasai Negara Indonesia timur yang berkedudukan di Makassar. Tampak pemerintahan di kedua wilayah ini masing-masing di pegang oleh "controleur" sampai penyerahan kedaulatan RI pada tanggal 27 desember 1949

Status Daerah Swapraja masih tetap di akui walaupun penempatan pejabat saat itu ditentukan oleh pemerintah belanda disebut *Hoofd Van Plaatseluke Bestuur* (H.P..B). Setelah berlakunya R.I.S pejabat yang berwenang memegang masing-masing wilayah ini adalah kepala pemerintah negara (KPN). Proses perjuangan panjang terbentuknya Kabupaten Buol Tolitoli dimulai tahun 1953 oleh tokoh-tokoh politik di wilayah Buol dengan melalui suatu musyawarah dan sekaligus menjadi program partai untuk memperjuangkan daerah otonom dan melepaskan diri dari Kabupaten Gorontalo. Namun disadari bahwa persyaratan untuk menjadi suatu daerah otonom khususnya wilayah Buol belum kemungkinan karena di samping potensi luas wilayah juga penduduknya yang masih kurang.

Mengingat wilayah Tolitoli adalah wilayah yang bertetangga dengan wilayah Buol, bahkan keturunan dan persamaan kebudayaan masih mewarnai kedua suku di wilayah ini, maka pada tahun 1955 para delegasi dari wilayah Buol datang bermusyawarah dengan tokoh-tokoh politik dan pemerintah di wilayah Tolitoli. Upaya ini mendapat tanggapan yang positif untuk menyatukan kedua wilayah ini menjadi satu daerah otonom yaitu daerah Kabupaten Buol Tolitoli. Hasil musyawarah ini setelah mendapat dukungan dari partai politik dan pemerintah Kabupaten donggala dengan melalui suatu delegasi juga di sampaikan pada gubernur Sulawesi tengah. Keinginan masyarakat di kedua wilayah ini adalah sejalan dengan program pemerintah Sulawesi untuk penambahan daerah tingkat II dari 14 Kabupaten menjadi 26 Kabupaten.

Tahun 1956 masyarakat dari kedua wilayah ini menuangkan keinginannya dalam surat permohonan kepada pemerintah pusat agar kedua wilayah kewedanan ini dijadikan satu daerah otonom Kabupaten Buol Tolitoli. Tanggal 15 juni 1957 di bentuk badan panitia penuntut Kabupaten Buol Tolitoli. Sebagai utusan yang kedua kalinya dipilih lima orang anggota panitia sebagai delegasi yang memperjuangkan sampai ke tingkat pusat. Tanggal 16 agustus 1957 pada delegasi Tersebut menghadap menteri dalam negri. Hasil pertemuan dengan mendagri telah mendapat keputusan terbentuknya Kabupaten Buol Tolitoli yang dibuktikan dengan surat keterangan persetujuan.

Dengan UU No.29 tanggal 31 oktober 1959 ditetapkan pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi tengah, termasuk dati II Buol Tolitoli dengan bupati kepala daerah yang pertama adalah Hi. Rajawali Muhammad Pusadan yang dilantik tanggal 15 juli 1960. Dengan demikian tanggal tersebut di tetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Buol Tolitoli. Akan tetapi dengan undang-undang No.51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol Tolitoli telah menjadi Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli. Akhirnya, pada tahun 2000 Kabupaten Buol Tolitoli berubah nama menjadi Kabupaten Tolitoli berdasarkan perda No.9 tahun 2000 tentang perubahan nama Kabupaten Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli sampai sekarang.

Secara geografis Kabupaten Tolitoli yang merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam peta Sulawesi Nampak memanjang dari timur kebarat terletak di sebelah utara garis khatulistiwa dalam koordinat 0,35°-1,20° LU dan 120°-122,09° BT, Serta batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Buol dan Laut Sulawesi
2. Sebelah Timur : Kabupaten Gorontalo
3. Sebelah Barat : Kabupaten Donggala
4. Sebelah Selatan : Selat Makassar yang memisahkan Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan

Luas Wilayah Kabupaten Tolitoli adalah 4.079,77 Km<sup>2</sup> dan terletak pada ketinggian 0-2500 meter dari permukaan laut dengan keadaan topografi datar hingga pegunungan dengan daratan rendah yang umumnya tersebar disekitar pantai dan letaknya bervariasi.

#### Analisis Deskriptif

analisis deskriptif dalam penelitian ini memberikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan Dana perimbangan Dan Kemandirian keuangan daerah di kabupaten tolitoli.

#### Analisis Dana Perimbangan Kabupaten Tolitoli

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN Yang dialokasikan kepada daerah (Otonom) Untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

**Tabel 1. Perkembangan Dana Perimbangan 2013-2022**

Tahun	Dana Primbangan	kenaikan (penurunan)	%
	(Rp.)	(Rp)	
2013	581.470.587.000	`	-
2014	636.127.768.000	54.657.181.000	8,59
2015	670.921.263.000	34.793.495.000	5,19
2016	761.289.991.000	90.368.728.000	11,87
2017	881.358.339.000	120.068.348.000	13,62
2018	816.482.058.000	-64.876.281.000	-7,95
2019	906.631.647.000	90.149.589.000	9,94
2020	816.703.212.000	-89.928.435.000	-11,01
2021	973.286.009.000	156.582.797.000	16,09
2022	911.810.887.000	-61.475.122.000	-6,74

Sumber : Data sekunder yang telah di olah (2023)

Realisasi Dana perimbangan pada tahun 2014-2021 Mebgalami kenaikan setiap tahunnya, ditahun 2021 Mengalami kenaikan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 Yang belum tahu kapan akan berakhir, ditambah dengan kemunculan varian virus menjadi tantangan dalam dinamika perekonomian, namun optimisme pemulihan ekonomi terus berlanjut. Kantor pelayanan perbendaharaan kabupaten Tolitoli sebagai instansi vertikal direktorat jenderal perbendaharaan berada terdepan dalam memberikan layanan penyaluran dana APBN untuk wilayah kabupaten Tolitoli.



Gambar 1. Data Perimbangan

### Analisis Perkembangan kemandirian keuangan

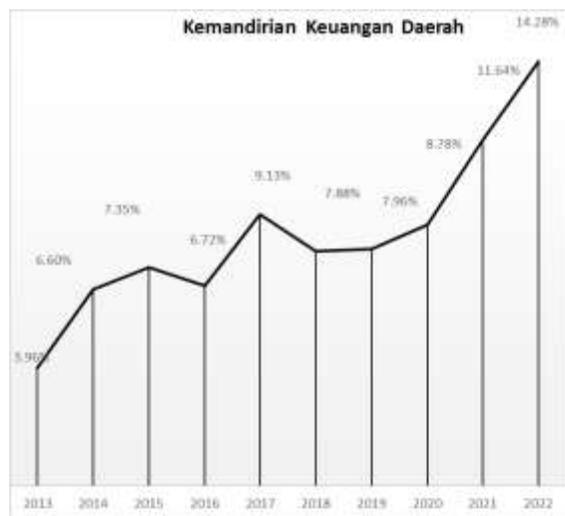
Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tabel 2. Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah 2013-2022

Tahun	Kemandirian Keuangan Daerah (%)	kenaikan (penurunan) (%)	%
2013	3,96	-	-
2014	6,6	2,64	Kenaikan
2015	7,35	0,75	Kenaikan
2016	6,72	-0,63	Penurunan
2017	9,13	2,41	Kenaikan
2018	7,88	-1,25	Penurunan
2019	7,96	0,08	Kenaikan
2020	8,78	0,82	Kenaikan
2021	11,64	2,86	Kenaikan
2022	14,28	2,64	Kenaikan

Sumber : Data sekunder yang telah di olah (2023)

Realisasi Kemandirian keuangan daerah tahun 2014-2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya, ditahun 2022 mengalami kenaikan dikarenakan Diterbitkannya peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2021 Tentang pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyaluran dana bantuan operasional baik bantuan operasional sekolah (BOS) Maupun bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan PAUD (BOP PAUD) Dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan ( BOP Kesetaraan ) Telah dilakukannya penyempurnaan dalam mekanisme penyaluran



**Gambar 3. Kemandirian Keuangan Daerah**

### Analisis Statistik Deskriptif

Deskriptif variabel penelitian memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yang terdiri atas jumlah pengamatan, nilai rata-rata, dan standard deviasi. Tabel 4.3 memperlihatkan uji statistik sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

#### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	2,0799	,34509	10
DANA PERIMBANGAN	889146,5260	74733,83414	10

Sumber data : *olahan data 2023*

Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel 4.3 diperoleh nilai rata-rata Variabel Bebas Dana perimbangan Sebesar 889146,5260 Dengan standar deviasi 74733,83414. Dan nilai rata-rata Variabel Terikat Kemandirian keuangan daerah sebesar 2,0799 dengan standar deviasi 0,34509.

Setelah analisis deskriptif penelitian, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

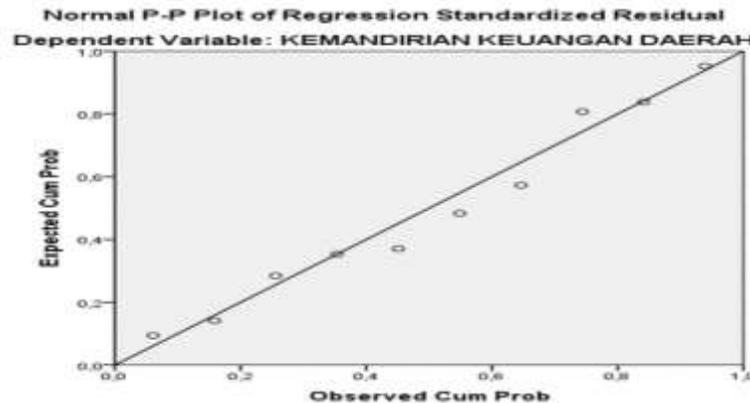
### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model linear sederhana

yang dilakukan pada penelitian ini memenuhi persyaratan seperti uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Masing-masing pengujian asumsi klasik tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Uji Normalitas

Dengan bantuan SPSS 23 uji normalitas data dapat diperhatikan pada gambar 4.1 sebagai berikut :

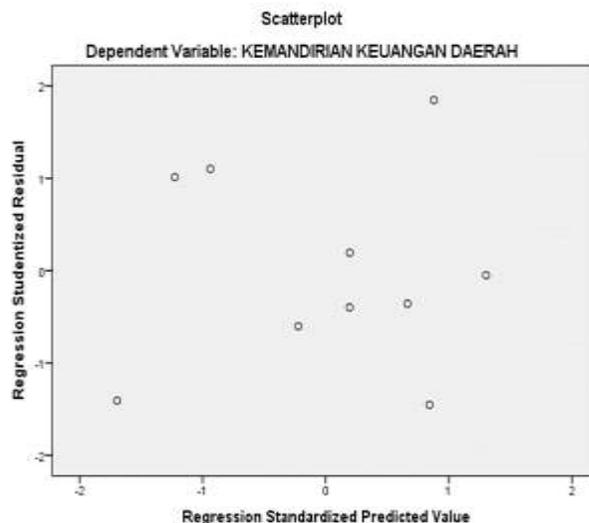


Gambar 4. Hasil uji normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat bahwa titik penyebarab disekitar garis diagonal dan penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.

2) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidak samaan varian residual antara yang satu dengan yang lain. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot*. Pada gambar 4.2 di bawah ini sebagai berikut



Gambar 5. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot diatas bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik penyebaran diatas angka 0 pada sumbu Y, maka data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan-kesalahan pada data runtut waktu. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan cara melihat nilai statistik *durbin-watson* dengan kriteria pengambilan keputusan menurut Ghozali (2016) bahwa DW terletak antara -2 dan +2 maka tidak ada autokorelasi. Hasil uji *durbin-watson* dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

#### Hasil Uji Autokorelasi

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,851 <sup>a</sup>	,724	,689	,19234	,724	20,972	1	8	,002

a. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Sumber data : *olahan data 2023*

Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa nilai *Sig.F Change* adalah 0,002. Berdasarkan tabel *Sig.F Change* dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi.

### Analisis Regresi Linier Sederhana

Data hasil tanggapan responden kemudian didistribusikan kedalam SPSS 21, untuk mengetahui bagaimana pengaruh dapat dilihat dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana yang sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Y= Nilai Y yang diprediksikan

a= Konstanta

b= Koefisien regresi Variabel X

**Tabel 4.5**

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,413	,765		-1,847	,102
	DANA PERIMBANGAN	3929,000	,000	,851	4,580	,002

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Sumber: *Data Olahan, 2023*

Atas dasar perhitungan tabel 4.5 di atas, maka dapat dituliskan persamaan regresi linier sederhana menjadi sebagai berikut:

$$Y = -1,413 + 3929,000X + e$$

Dari hasil perhitungan dan persamaan analisis statistik koefisien regresi sederhana diatas dapat di artikan:

- 1) Jika tidak ada dana perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak maka kinerja kemandirian keuangan daerah kabupaten toli toli Mengalami Devisi sebesar -1,314.
- 2) Jika tidak ada dana perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak maka kinerja kemandirian keuangan daerah kabupaten toli toli Mengalami Devisi sebesar 3929,000.

Adapun faktor-fakot lainnya yang bukan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.6**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,776	1	,776	20,972	,002 <sup>b</sup>
	Residual	,296	8	,037		
	Total	1,072	9			

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

b. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN

*Sumber: Data Olahan, 2023.*

Dari tabel 4.6 dapat dilihat pengaruh dana perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli dapat ditemtikan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana antara satu variabel indeviden yaitu dana perimbangan (X) Terhadap Variabel dependen yaitu Kemandirian keuangan daerah (Y) Kabupaten Tolitoli.

Penganbilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana mengacu pada dua Hal Yaitu :

- a. Jika nilai signifikan lebih kecil < dari 0,05 ( sig dari < 0,05 ) maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.
- b. Jika nilai signifikan lebih besar > dari 0,05 ( sig > dari 0,05 ) artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai signifikan 0,002 yang dimana lebih kecil < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan Daerah . Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu.

### Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis menggunakan model regresi linear sederhana dengan model enter pada pada tingkat signifikan 0,05. Regresi linear sederhana digunakan untuk menguji data secara Parsial (Uji t) Yaitu pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuanagn daerah.

- 1) Uji Parsial (Uji t)

Tabel

Hasil Parsial

4.7

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,413	,765		-1,847	,102
	DANA PERIMBANGAN	3929,000	,000	,851	4,580	,002

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan uji statisti t dapat ditunjukkan seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

#### a. Variabel Dana Perimbangan

Uji t terhadap Variabel Dana Peimbangan (X1), Di dapatkan t hitung > t tabel Yaitu  $4,580 > 1,860$  dan  $\text{sig } 0,002 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Artinya variabel dan perimbangan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah.

### Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa besar pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R square*

**Tabel 4.8**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,851 <sup>a</sup>	,724	,689	,19234	,724	20,972	1	8	,002

a. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan hasil uji Adjusted  $R^2$  pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 72,4 % . Ini menunjukkan bahwa Kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh Variabel dana perimbangan sebesar 72,4 % , Sedangkan sisanya merupakan Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah antar lain pendapatan hasil daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh penjelasan pengaruh Variabel X terhadap Y secara parsial adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa Dana perimbangan Berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah. Dari hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa Dana perimbangan di kabupaten Tolitoli berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah di kabupaten Tolitoli. Diperoleh koefisien regresi untuk Dana perimbangan sebesar 3929,000 hal ini berarti setiap terjadi penambahan dana perimbangan 1 satuan maka akan terjadi kenaikan terhadap Kemandirian keuangan daerah sebesar 3929,000. Artinya apabila dana perimbangan meningkat maka Kemandirian daerah juga meningkat.

Hal ini menjelaskan Bahwa dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum

dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak masi menjadi penopang atau penunjang dalam mendorong kemandirian keuangan daerah kabupaten Tolitoli. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Oleh Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021) yang menyatakan secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Tolitoli. Artinya, peningkatan Dana Perimbangan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tolitoli.
2. Tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tolitoli masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada Dana Perimbangan dan belum mampu secara mandiri membiayai kebutuhan daerah.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli perlu menggali potensi PAD yang ada, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari aset daerah.
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli perlu menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
3. Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Mengelola Dana Perimbangan: Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur daerah dalam merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan Dana Perimbangan secara optimal.
4. Melakukan Penelitian Lebih Lanjut: Penelitian ini hanya fokus pada pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan iklim investasi.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tolitoli dan mendorong pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Adiputa, dkk. (2015)
- [2] Dandi Darmadi. (2021).
- [3] Fahri Eka Oktora. (2013).
- [4] Ghozali, I. (2015).
- [5] Ghozali, I. (2016).
- [6] Mardiasmo. (2003).
- [7] Nadya Putri Saraswati, & Nashirotn Nisa Nurharjanti. (2021).
- [8] Sugiyono. (2013).

- [9] Sugiyono. (2018).
- [10] Sugiyono. (2019).
- [11] Tri Wahyuningsih. (2020).
- [12] Wandiea. (2013).